



Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Jayakarta Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Karawang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid 19

Deri Ramdani Idris¹, Gili Argenti², Sopyan Resmana Adiarsa³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1610631180036@Student.Unsika.Co.id, HP. 085777052500

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Mei 2022

Direvisi: 1 Juni 2022

Dipublikasikan: Juni 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6610543

Abstract:

This study aims to study and determine the Political Participation of the Jayakarta District Community in the 2020 Karawang Regency simultaneous regional head election during the Covid 19 pandemic. This study used a descriptive qualitative research method with data collection methods in the form of interviews, observations and documentation studies. This study uses the theory of political participation proposed by Milbrath with four indicators, namely the presence of political incentives, factors of a person's personal characteristics, factors of a person's social characteristics, and factors of the political situation or environment. The results of this study can be seen from the four factors of Milbrath's political participation. First, political stimulation shows that political stimulation in the 2020 Karawang Regency election in Jayakarta District shows a lack of stimulation, this is due to the lack of socialization carried out by the Jayakarta District PPK. The two factors of a person's personal characteristics indicate that the political awareness of the people of Jayakarta Subdistrict is still low, this can be seen from the lack of people who want to be involved in the Karawang election organizers in 2020. The three factors of a person's social characteristics, in terms of social characteristics in Jayakarta District, money politics are very massive and occur and strongly influence the community to participate. The four factors of the situation or political environment in the 2020 Karawang election, many people in the Jayakarta District were confirmed to have been exposed to the COVID-19 virus, so there were concerns from the public to attend and use their voting rights to the polling station.

Keywords: Political participation, Pilkada, Karawang, Covid19

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah dari gerakan reformasi tahun 1998. Pola top down dan patrimonial begitu mendominasi dalam politik di Indonesia, tuntutan

reformasi yang paling esensial adalah mengganti praktek-praktek otoriterisme dengan mekanisme yang lebih demokratis, yaitu mekanisme pilkada. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (Suyatno, 2016).

Kelembagaan praktik demokrasi langsung di level daerah, telah memulai babak baru ketika muncul ketidakpuasan dari rakyat terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, ketidakpuasan tersebut muncul ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang banyak menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya. Untuk meredam hal tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang membatalkan aturan sebelumnya (Hardjaloka, 2015).

Dalam hal ini masyarakat sebagai aktor utama dalam pemilihan ini dituntut agar lebih partisipatif dalam segala bentuk tahapan penyelenggaraan Pemilu. Proses ini membuktikan adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka. Selain itu pemimpin yang dipilih nantinya akan memberikan kemampuan yang terbaik dalam mengelola dan mengatur pemerintahannya melalui pemilihan kepala daerah ini (Azhar Sa'ban, 2018)

Pemilihan kepala daerah serentak 2020 direncanakan akan dilaksanakan pada 23 September mendatang. Indonesia merupakan negara ke-35 dari 46 negara yang memutuskan untuk menunda proses perombakan kepemimpinan politik melalui mekanisme pemilihan (Hizra Marisal, 2020).

Berdasarkan informasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia total daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak ini adalah sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (Sarrah Kurnia Fadhillah, 2020). Pilkada serentak pada tahun 2020 ini mengalami berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat, organisasi sosial, lembaga pemerintahan dan lain sebagainya.

Pasalnya saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan utama oleh seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Mengingat bahwa semakin meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia sehingga membuat keresahan dimasyarakat agar pilkada ini ditunda pelaksanaannya.

Akibat Covid-19 yang semakin meningkat kasusnya di Indonesia, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya (Riska Rahmat Laila, 2020).

Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari 224 Kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakan pilkada serentak 2020, pandemic covid masih menjadi permasalahan utama di masyarakat Kabupaten Karawang, namun kebijakan pemerintah pusat yang ingin tetap melaksanakan melaksanakan pilkada serentak 2020 membuat Kabupaten Karawang harus ikut juga dalam melaksanakannya. Partisipasi di Kabupaten Karawang pada pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2020 KPU menargetkan 77% partisipasi pemilih sedikit berat untuk mencapai target tersebut dimasa pandemic ini, bahkan Kabupaten Karawang termasuk ke dalam zona merah di Provinsi Jawa Barat akan tetapi fakta di lapangan walaupun KPU Kabupaten Karawang tidak mencapai target yang ditentukan akan tetapi masyarakat yang berpartisipasi dalam pilkada serentak 2020 cukup baik sekitar 70% dari DPT 1.656.200 Pemilih Laki-Laki sebanyak 829.679 Dan Pemilih Perempuan 826.521 Dari 4.451 TPS dari hasil

rekapitulasi pemilih laki laki 556.310 dan pemilih perempuan 603.352 total pemilih 1.596.66 suara (Sumber : KPU Kab.Karawang 2021).

Dapat diketahui bahwa dalam beberapa pemilu yaitu pemilu kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang Tahun 2020, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota tahun 2019, dan Pemilu Kepada Daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang Tahun 2015 menempatkan Kecamatan Jayakarta selalu pada peringkat terendah dalam partisipasi politik masyarakatnya. Data ini mendorong ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Jayakarta dalam pemilu. Pemilu yang terakhir diselenggarakan adalah Pemilu tahun 2020 sehingga dalam penelitian ini pemilu yang peneliti jadikan konteks penelitian adalah pemilu tahun 2020.

Sehubungan dengan konteks lingkungan global dan nasional yang juga sedang dilanda pandemi, rendahnya partisipasi politik masyarakat ini jika dikaitkan dengan situasi pandemi tersebut maka peneliti dapat menduga bahwa rendahnya partisipasi politik tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Dugaan sementara peneliti ini didasarkan pada apa yang diungkapkan oleh Milbrath dan Maran (2007:156) yang mengatakan bahwa 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi adalah 1) Perangsang Politik; 2) Karakteristik pribadi seseorang; 3) karakteristik sosial seseorang; 4) situasi atau lingkungan politik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai partisipasi politik dalam pemilu tahun 2020 di kecamatan Jayakarta

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono (2017) yakni sebuah metode yang digunakan oleh

peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar

Teknik pengambilan data dilalui melalui model triangulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dilakukan di wilayah kabupaten Karawang dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diperoleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perangsang Politik

Banyak orang melakukan aktivitas politik karena tergiur atau terpesona menyaksikan peranan, kesejahteraan, kemewahan dan lain-lain dari para pelaku politik praktis. Ada juga yang terangsang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu, baik dalam organisasi politik itu sendiri, birokrasi, eksekutif, legislatif, perusahaan negara dan sebagainya. Rangsangan-rangsangan tersebut membuat pelaku politik sering melakukan berbagai rangsangan kepada pihak lain untuk memuluskan tujuannya. Faktor ini selalu dimanfaatkan oleh para pelaku politik dalam berkompetisi meraih kemenangan dan mendapatkan dukungan.

Penulis mencoba mewawancarai berbagai informan mengenai rangsangan politik berdasarkan Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Jayakarta Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Kabupaten Karawang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid 19. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh seberapa sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi informal. Sehingga orang mau ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Proses sosialisasi pilkada sangat penting dilakukan karena untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan diadakannya pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2020 dan juga untuk menentukan pembangunan serta kebijakan Kabupaten Karawang kedepannya, pilkada tahun 2020 ini menuai banyak polemik di masyarakat agar ditundanya pilkada ini karena situasi di seluruh Indonesia yang sedang di landa pandemi covid-19 sehingga masyarakat merasa khawatir akan terpaparnya virus pada penyelenggaraan pilkada 2020. Pentingnya peran penyelenggara dalam mensosialisasikan pilkada ini untuk meyakinkan masyarakat dari kekhawatiran terkait virus covid-19 saat memilih sehingga masyarakat merasa nyaman dan hadir berpartisipasi pada pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua divisi sosialisasi KPU Kabupaten Karawang Ikmal Maulana menyatakan bahwa:

“Sangat penting, sosialisasi proses pemilihan umum itu yang akan menentukan arah pembangunan, kebijakan, sosial hukum, minimal 5 tahun kedepan untuk Kabupaten Karawang dan sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahuinya.”

Perihal pentingnya peran penyelenggara dalam melakukan rangsangan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pilkada tahun 2020 ini harus lebih ekstra dalam melakukan sosialisasi maka dari itu KPU menggandeng mitra untuk membantu ikut mensosialisasikan pilkada ini. Pada pilkada tahun 2020 kegiatan sosialisasi terbatas

jumlah audensinya karena sedang dalam masa pandemi hal ini KPU Kabupaten Karawang menggandeng OKP (Organisasi Kepemudaan) sebagai mitra untuk mempercepat penyebaran informasi sosialisasi pilkada hal dilakukan oleh untuk mensukseskan pilkada Karawang tahun 2020. KPU Kabupaten Karawang juga menggandeng guru PPKN untuk membantu mensosialisasikan pentingnya pilkada kepada siswa dengan target pemilih pemilih pemula agar lebih pro-aktif terhadap setiap pemilihan. Hal ini berdasarkan KPU Kabupaten Karawang tetap melakukan sosialisasi pilkada. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Karawang Ikmal Maulana menyatakan bahwa:

“Dimasa pandemi ini kami tetap melakukan sosialisasi walaupun terbatas jumlah audiensinya dan tetap menggunakan proses, kami juga menggandeng aktivis sosial media untuk menjadi mitra kami untuk membantu mensosialisasikan pilkada ini, selain itu kami juga menggandeng ormas, okp, mahasiswa dan osis untuk membantu sosialisasikan terkait pilkada ini. Kami juga menggandeng para guru PPKN untuk menjadi mitra kami dalam upaya memberikan edukasi terkait pentingnya pemilihan kepada siswa dengan tujuan agar harapan kami siswa lebih pro aktif dan berkontribusi dalam pilkada 2020.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan rangsangan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang dan PPK Kecamatan Jayakarta belum optimal. Hal ini dilihat dari tidak adanya rangsangan politik dilakukan oleh PPK Kecamatan Jayakarta melalui akun media online, dan juga tidak meratanya kegiatan sosialisasi secara langsung, sosialisasi secara langsung

hanya dilakukan di beberapa wilayah di Kecamatan Jayakarta. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui dilaksanakannya proses sosialisasi pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020 di Kecamatan Jayakarta. Rangsangan politik sangat penting dilakukan, karena menjadi tolak ukur masyarakat yang hadir ke TPS untuk ikut serta dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpinnya.

Karakteristik Pribadi seseorang

Dalam hal ini seseorang yang mempunyai watak sosial atau mempunyai kepedulian yang baik terhadap problem-problem yang dialami masyarakat, biasanya lebih mudah dan mau untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang yang berkarakter demikian cenderung ingin selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas pengabdianya kepada masyarakat. Maka dari itu penulis mencoba mewawancarai berbagai informan mengenai karakteristik pribadi seseorang berdasarkan Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Jayakarta Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Karawang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid 19.

Memang ketika bicara soal demokrasi, sebuah peralihan kekuasaan tentu memang penting karena ini berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan. Oleh karenanya ini juga menyangkut hajat orang banyak. Karakteristik masyarakat pada penyelenggaraan pilkada Karawang tahun 2020 sangatlah beragam dan sangat susah untuk di ketahui. Ada masyarakat yang merespon pilkada dengan sangat antusias, karena akan memilih pemimpinnya untuk lima tahun kedepan. Ada juga masyarakat yang apatis atau acuh terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2020 karena diselenggarakan di tengah pandemi covid-19. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Karawang Ikmal Maulana menyatakan bahwa:

“Secara *general* dari beberapa informasi yang dilakukan oleh

lembaga survey karawang itu termasuk kedalam pemilih yaitu 50% peduli terhadap pemilihan dan 50% tidak peduli terhadap pemilihan jadi susah di prediksi.”

Kendala dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020 selain dari pilkada dilaksanakan pada saat pandemi, di Kecamatan Jayakarta pada saat penyelenggaraan pilkada dalam masa panen hal ini menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan jumlah partisipasi politik masyarakat karena mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Jayakarta Sunarto yang menyatakan bahwa:

“Pilkada kemarin memang berbeda dengan pilkada sebelumnya dikarenakan adanya virus Covid19, kendalanya pertama yaitu dari sosialisasi pilkada yang memang terbatas dihadiri oleh masyarakat dan juga banyak masyarakat kami yang diluar kota yang sedang bekerja tidak bisa pulang. Lalu yang kedua pada pilkada kemarin di wilayah Kecamatan Jayakarta sedang masa panen raya hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah partisipasi karena mayoritas penduduk disini bekerja di sektor pertanian.”

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat penting. Hal ini bagaimana pemerintah menjalankan hak-hak masyarakat sesuai dengan apa yang mereka kampanyekan pada proses sebelum terpilih. Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian merasa tidak percaya kepada pemerintah karena mereka selalu dikasih janji-janji yang tak pernah di tepati maka dari itu kebanyakan masyarakat tidak memilih dan lebih mementingkan bekerja apalagi penyelenggaraan pemilihan kemarin di musim panen raya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Pardi

masyarakat Kecamatan Jayakarta yang berprofesi sebagai Petani yang menyatakan bahwa:

“Pada pemilihan kemarin saya tidak memilih, karena pada pemilihan kemarin disini sedang panen padi. Saya lebih memilih bekerja karena jelas untuk diri sendiri di banding cuman memakan janji semata karena kalau sudah terpilih pasti lupa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat kecamatan Jayakarta dapat disimpulkan kurangnya kesadaran politik di masyarakat kecamatan Jayakarta terkait pemahaman pentingnya pemilihan bupati Karawang tahun 2020, masih banyak masyarakat yang ingin terlibat langsung kedalam penyelenggaraan pilkada karawang 2020. Masyarakat lebih memilih bekerja dari pada ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya pada pilkada Karawang tahun 2020 dikarenakan masyarakat merasa kecewa kepada pemerintah karena masyarakat hanya di kasih janji semata pada saat kampanye. Para calon bupati hanya menjanjikan sesuatu tetapi tidak pernah ditepati pada saat calon tersebut terpilih.

Faktor karakteristik Sosial seseorang

Status sosial ekonomi merupakan salah satu kedudukan sosial seseorang warga negara, hal ini sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku politik. Seseorang yang mempunyai ekonomi yang tinggi memiliki lebih pemahaman pengetahuan politik dan mereka memberikan perhatian lebih. Sebaliknya masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata mereka lebih dan *apatistis* dan mementingkan untuk meningkatkan taraf hidup dirinya sendiri. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Karawang Ikmal Maulana menyatakan bahwa:

“Ekonomi memang berpengaruh terhadap kepedulian demokrasi, masyarakat ekonominya rendah mereka mungkin tidak memikirkan terkait demokrasi,

walaupun tidak semua masyarakat ekonominya rendah punya polemik begitu, tapi sebagian besar masyarakat dengan tingkat ekonominya dibawah rata-rata mereka lebih mengamankan kepentingan mereka secara ekonomi misalnya bekerja daripada memikirkan urusan diluar itu..”

Politik uang yang selalu terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilihan dengan tujuan untuk mendapatkan perolehan suara. *Money politic* dalam aturan pemilihan tidak di perbolehkan, akan tetapi pada setiap pemilihan sudah menjadi budaya di masyarakat, karena masyarakat beranggapan kalau tidak ada “amplop” mereka tidak akan memilih. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Maulana Rifai Akademisi Politik yang menyatakan bahwa:

“Politik uang itu bisa dianggap sebagai hal yang lazim dan lumrah karena saya merasa bahwa semua kandidat melakukan hal yang sama akan tetapi tidak bisa dibuktikan secara kongkrit, karena politik uang hampir dilakukan di setiap pemilihan. Bahkan ada pandangan kalo tidak ada amplop saya engga milih. Dalam konteks pemilihan di Kabupaten Karawang sedikit banyak politik uang itu memang cukup mempengaruhi pemilih. Meskipun saya pribadi menolak dengan politik uang karena memang *money politic* ini menjadi paradoks dalam sebuah demokrasi langsung karena tidak sedikit para pejabat publik yang di tangkap oleh KPK di akibatkan salah satunya yaitu dari *cost politic* yang mahal dan salah satunya *money politic* tadi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat kecamatan Jayakarta dapat disimpulkan bahwa memang benar bahwa sosial ekonomi status menentukan

partisipasi politik masyarakat untuk memilih contohnya saja dari status ekonomi, masyarakat yang tingkat ekonominya diatas rata-rata mereka lebih memilih calon yang sesuai dengan pilihan pribadi walaupun dikasih uang oleh salah satu calon dan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah mereka memilih kalau memang ada yang memberi uang dari salah satu calon kalau tidak ada mereka tidak akan memilih. Politik uang itu bisa diaanggap sebagai hal yang lazim dan lumrah di masyarakat, karena politik uang hampir dilakukan di setiap pemilihan. Bahkan ada pandangan di masyarakat kalo tidak ada amplop saya tidak bakal memilih, karena masyarakat sudah tidak percaya dengan janji-janji para calon makanya mereka lebih memilih uang lalu memilihnya. Hal ini menjadi sebuah paradoks dalam sebuah demokrasi langsung karena tidak sedikit para pejabat publik yang di tangkap oleh KPK dampak dari *cost* politik yang sangat mahal yaitu *money politik*.

Situasi Lingkungan

Penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Karawang selalu berjalan kondusif dan tidak pernah meninggalkan konflik di masyarakat. Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini di selenggarakan dalam kondisi pandemi Covid-19, akan tetapi sangat penting pilkada ini terselenggara karena demi keberlangsungan pemerintahan dan tidak boleh ada kekosongan jabatan. Dalam kondisi yang sedang pandemic virus Covid-19 seperti ini kita mampu menyelenggraan pemilukada ini dengan menerapkan protokol kesehatan dengan aman. Memang ini sangat berpengaruh sekali kaitannya dengan partisipasi masyarakat karena pasti ada kekhawatiran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Maulana Rifai Akademisi Politik yang menyatakan bahwa:

“Secara umum saya melihat di Kabupaten Karawang cukup kondusif, karena saya pernah satu forum dengan Kapolres

Kabupaten Karawang beliauapun menyampaikan bahwa Karawang secara umum aman tidak ada konflik-konflik yang sifatnya masif adanya pengerusakan-pengerusakan di wilayah lainnya. Pada saat Desember itu memang angka kasus covid di Kabupaten Karawang itu memang cukup tinggi, namun tidak lantas menjadikan pilkada ini tidak bisa di laksanakan jangan sampe ada kekosongan kekuasaan. Saya anggap pilkada kemarin sukses dari segi partisipasi maupun pelaksanaannya.”

Kondisi politik di Kecamatan Jayakarta pada pemilihan bupati Karawang tahun 2020 kondusif tidak ada permasalahan di kecamatan, namun kondisi Covid-19 di Kecamatan Jayakarta pada penyelenggaraan pilkada cukup tinggi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Budiman Achmad selaku Kepala Kecamatan Jayakarta yang menyatakan bahwa:

“Pada saat berlangsung maupun sesudah pilkada itu kondusif tidak ada kejadian-kejadian apapun di masyarakat kami dan terkait virus covid pada bulan desember pelaksanaan pemilukada ini belum menunjukan angka yang tinggi kita masih mampu menyelenggarakan dengan aman.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat kecamatan Jayakarta dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pilkada Karawang tahun 2020 terselenggara di masa pandemi, kondisi Covid-19 di Kecamatan Jayakarta pada saat itu memang cukup lumayan tinggi hal ini cukup banyak masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19, dan ada kekhawatiran dari masyarakat untuk hadir dan ikut berpartisipasi menggunakan hak

suaranya ke TPS karena takut ikut terpaparnya virus Covid-19 ini.

PEMBAHASAN

Perangsang Politik

Dalam teori yang dikemukakan Milbrath dalam Maran (2007:156) minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh seberapa sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi informal, sehingga orang mau ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal rangsangan politik pada penyelenggaraan pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020 di Kecamatan Jayakarta belum berjalan dengan baik, karena penyelenggaraan pilkada dilaksanakan pada masa pandemi dimana proses kegiatan sosialisasi langsung pilkada jumlah audiensi masyarakat di batasi. PPK Kecamatan Jayakarta tidak memanfaatkan media sosial untuk melakukan proses sosialisasi online hal ini berdasarkan hasil observasi menemukan akun resmi Facebook PPK Kecamatan Jayakarta tidak pernah melakukan postingan terkait sosialisasi pilkada, bahkan akun Instagram PPK Kecamatan Jayakarta telah terblokir. Sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum tahu sosialisasi pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020.

Faktor karakteristik pribadi seseorang

Dalam teori yang dikemukakan Milbrath dalam Maran (2007:156) orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik ekonomi dan lain-lainnya biasanya mau terlibat dalam aktifitas politik. Dalam hal faktor karakteristik pribadi di Kecamatan Jayakarta masih kurang kesadaran politik di masyarakat, masih minim masyarakat yang ingin ikut terlibat penyelenggara pilkada Karawang tahun 2020. Dimana masyarakat lebih memilih bekerja daripada ikut berpartisipasi karena mereka sudah kecewa terhadap pemerintah dan cuman dikasih janji semata.

Faktor karakteristik Sosial seseorang

Dalam teori yang dikemukakan Milbrath dalam Maran (2007:156) karakter

sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Dalam faktor karakteristik sosial di Kecamatan Jayakarta politik uang sangat massif terjadi dan sangat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. bahkan ada pandangan kalo tidak ada amplop mereka tidak akan memilih, karena masyarakat sudah tidak percaya sama janji-janji para calon. Hal ini menjadi paradoks dalam sebuah demokrasi karena tidak sedikit pejabat yang di tangkap oleh KPK karena kasus korupsi yang di akibatkan oleh mahalnnya *cost* politik yang sangat mahal.

Faktor Situasi Lingkungan

Dalam teori yang dikemukakan Milbrath dalam Maran (2007:156) lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Pada pilkada Karawang tahun 2020 situasi covid-19 di Kecamatan Jayakarta banyak masyarakat yang terkonfirmasi terpapar virus covid19 sehingga ada kekhawatiran dari masyarakat untuk hadir dan menggunakan hak suaranya ke TPS. Melihat tingginya angka Covid19 di kecamatan Jayakarta seharusnya pemerintahan daerah Jayakarta membuat sebuah solusi yang dapat meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS. Hal ini tentu harus dilakukan karena hak pilih masyarakat akan menentukan masa depan masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi dan data-data mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Jayakarta Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Kabupaten Karawang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid 19 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perangsang politik

Dalam hal rangsangan politik pada penyelenggaraan pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020, di Kecamatan Jayakarta dalam hasil penelitian yaitu, penyelenggaraan pilkada dilaksanakan pada masa pandemi dimana proses kegiatan sosialisasi secara langsung dalam pilkada akan tetapi jumlah audiensi masyarakat di batasi, dan hanya dilaksanakan di beberapa wilayah saja. Serta PPK Kecamatan Jayakarta tidak memanfaatkan media sosial untuk melakukan proses sosialisasi online hal ini berdasarkan hasil observasi menemukan akun resmi Facebook PPK Kecamatan Jayakarta tidak pernah melakukan postingan yaitu terkait sosialisasi pilkada, bahkan akun Instagram PPK Kecamatan Jayakarta telah terblokir. Sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai sosialisasi pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020. Dari temuan tersebut bisa diartikan bahwa rangsangan politik yang diberikan tersebut masih kurang, hal inilah yang membuat masyarakat enggan untuk mengikuti sosialisasi bahkan enggan untuk berpartisipasi dalam Pilkada Karawang 2020. Apabila rangsangan yang diberikan terhadap masyarakat dilakukan secara intens maka tingkat partisipasi yang ada di masyarakat mungkin akan lebih tinggi dari angka partisipasi yang ada sekarang.

2. Faktor karakteristik pribadi seseorang

Dalam hal faktor karakteristik pribadi di Kecamatan Jayakarta masih kurang kesadaran politik di masyarakat, masih minim masyarakat yang ingin ikut terlibat penyelenggara pilkada Karawang tahun 2020. Dimana masyarakat lebih memilih bekerja daripada ikut berpartisipasi karena mereka sudah kecewa terhadap pemerintah dan hanya sekedar diberi janji. Temuan dari faktor ini dapat diartikan bahwa figur atau calon yang akan naik dalam Pilkada Karawang dalam perspektif masyarakat hanya memberikan

janji politik saja, namun pada implementasinya kurang. Faktor ini seyogyanya dapat muncul akibat kurang percayanya masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin yang sebelumnya sempat menjadi pemimpin mereka. Faktor ini pada umumnya sulit dihilangkan di masyarakat karena faktor ini sudah muncul dari pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa para calon kepala daerah datang kepada mereka disaat mereka memiliki kepentingan untuk mendulang suara. Jadi, wajar saja faktor ini jadi penghambat partisipasi masyarakat Kecamatan Jayakarta dalam Pilkada Kabupaten Karawang 2020.

3. Faktor karakteristik sosial seseorang

Dalam faktor karakteristik sosial di Kecamatan Jayakarta politik uang sangat massif terjadi dan sangat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. Bahkan ada pandangan kalau tidak ada amplop mereka tidak akan memilih, karena masyarakat sudah tidak percaya dengan janji-janji para calon. Hal ini menjadi paradoks dalam sebuah demokrasi karena tidak sedikit pejabat yang di tangkap oleh KPK karena kasus korupsi yang di akibatkan oleh mahalnnya *cost* politik yang sangat mahal. Menurut pengakuan masyarakat Kecamatan Jayakarta memang faktor politik uang saat mempengaruhi mereka, mereka berpendapat lebih baik memakan uangnya sekarang, karena berharap pada janji politik para calon Kepala Daerah adalah hal yang mustahil untuk diharapkan. Satu temuan menarik yang ditemukan oleh peneliti di daerah Jayakarta yang mengakibatkan turunnya partisipasi masyarakat Jayakarta adalah kurangnya persebaran politik uang yang turun ke masyarakat. Hal ini memang sedikit miris karena uang masih di atas segalanya dalam politik praktis saat ini.

4. Faktor situasi atau lingkungan politik.

Pada pilkada Karawang tahun 2020 banyak masyarakat di kecamatan Jayakarta yang terkonfirmasi terpapar virus covid19 sehingga ada kekhawatiran dari masyarakat untuk hadir dan menggunakan hak suaranya

ke TPS. Melihat tingginya angka Covid19 di kecamatan Jayakarta seharusnya pemerintahan daerah Jayakarta membuat sebuah solusi yang dapat meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS. Hal ini tentu harus dilakukan karena hak pilih masyarakat akan menentukan masa depan masyarakat itu sendiri.

Dari keempat kesimpulan di atas hikmah dan makna yang peneliti dapat adalah Pandemi Covid-19 memang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya Pilkada di Kabupaten Karawang, khususnya di Kecamatan Jayakarta saja. Di sisi lain kualitas demokrasi di tingkat lokal juga masih sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya calon kepala daerah yang menggunakan politik uang sebagai salah satu kendaraan politiknya (selain partai politik). Politik uang pada akhirnya juga diamini masyarakat, karena tanpa uang mereka enggan memilih dikarenakan mereka sudah tidak percaya lagi terhadap janji politik para calon pemimpin mereka. Melihat kondisi seperti ini masih sering terjadi, peneliti merasa bahwa kualitas demokrasi di Indonesia tidak akan mengalami kemajuan karena pemilihan kepala daerah lebih berbasis politik uang. Apabila hal ini masih terjadi maka yang ada dipikiran calon kepala daerah nantinya ketika mereka terpilih adalah bagaimana caranya mengembalikan modal politik yang sudah mereka keluarkan. Ketika para pemimpin sudah berfikir seperti itu, maka saya berpendapat bahwa kepentingan masyarakat itu hanya nomor dua.

Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah disimpulkan di atas, maka agar Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Jayakarta Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Karawang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid 19 sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Karawang bersama PPK kecamatan Jayakarta beserta

pemerintahan sebaiknya perlu melakukan sosialisasi pemilu jangka panjang dan berjenjang dari jauh-jauh hari bukan hanya dilakukan pada setiap pemilihan saja, sehingga konsep pemahaman masyarakat terkait pentingnya pemilu dapat tepat sasaran dan merata khususnya di wilayah kecamatan Jayakarta. Sehingga pada akhirnya masyarakat dapat mengerti dan lebih memahami serta menyadari bahwa peran aktif masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah sangat penting untuk masa depan kabupaten Karawang di masa depan.

2. PPK kecamatan Jayakarta harus membuat terobosan di setiap TPS dengan cara menghias TPS semenarik mungkin. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih tertarik datang ke TPS dan ikut memilih. Selain itu PPK Kecamatan Jayakarta juga bisa berkoordinasi dengan PKD yang ada di Kecamatan Jayakarta untuk berlomba-lomba membuat konsep TPS semenarik mungkin dan mungkin bisa juga diadakan doorprize di setiap TPS yang dapat menarik tingkat partisipasi masyarakat ketika Pilkada berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, Jhon W. 2015. *Penelitian kualitatif & Desain Riset : memilih diantara lima pendekatan; alih bahasa, Ahmad Lintang Lazuardi ; editor, Saifuddin Zuhri Qudsy*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230.

- Hardjaloka, L. (2015). Studi dinamika mekanisme pilkada di Indonesia dan perbandingan mekanisme pilkada negara lainnya. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 59-83.
- Sa'ban, L. A., & Wijaya, A. A. M. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 35-43.
- Marisa, H., Pornauli, A., Indra, A., & Aurora, A. (2020). The Regional Head Elections (Pilkada) 2020 During Covid-19 Pandemic: A Projection. *Journal of Election and Leadership*, 1(2), 64-68.
- Fadhillah, S. K., & Saragih, M. B. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BENGKULU PADA KAMPANYE POLITIK PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU 2020 DIMASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Humas & Media Kontemporer*, 1(1), 34-44.
- Di Gennaro, F., Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbuto, V., Veronese, N., & Smith, L. (2020). Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future perspectives: a narrative review. *International journal of environmental research and public health*, 17(8), 2690.
- NIM, R. A. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. *ASPIRASI-Jurnal Ilmu Politik*, 5(1).
- Sa'ban, L. A., & Sadat, A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 29-38.
- Arif, M., & Mulyana, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kecamatan Ternate Selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 381-395.
- Misno, I. M. G. R., & Sugiantiningsih, A. A. P. Public Political Participation in the 2020 Regional Head Election: The Case of Denpasar, Indonesia.
- Gloria Setyvani Putri 2020 WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> (diakses pada tanggal 9 Januari 2021).
- Yudha Maulana 2020 Tambah 801, Kasus Baru COVID-19 di Jabar Melonjak Lagi <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Barat/D-5254312/Tambah-801-Kasus-Baru-Covid-19-Di-Jabar-Melonjak-Lagi> (Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2021).
- World Health Organization <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> (diakses pada tanggal 12 Maret 2021).
- Kemenkes RI <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> (diakses pada tanggal 12 Maret 2021).
- BPS Kabupaten Karawang, 2021 <https://karawangkab.bps.go.id/indicator/12/35/1/jumlah->

- [penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html](#) (diakses pada tanggal 9 Desember 2022).
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
- Arsip Pemerintahan Kecamatan Jayakarta Tahun 2020
- Gatara, Sahid. 2009. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Pres
- Pawito. 2009. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan* Yogyakarta: (Unpublished)
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grsiondo, anggota Ikapi.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Syarbani, Syahrial. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia
- Kusnardi Moh. Dan Harmailiy Ibrahim. 1994. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti
- Budiarjdo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Prihatmoko. 2003. *Pemilihan Kepala daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta